

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki luas lahan dan agroklimat yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian. Indonesia juga dikenal sebagai penghasil beragam produk pertanian yang sangat dibutuhkan dan laku di pasar dunia, utamanya yang termasuk kelompok produk-produk perkebunan, rempah-rempah, kayu, dan perikanan. Disamping itu, sumbangan sektor pertanian terhadap serapan tenaga kerja, pendapatan nasional, dan devisa juga masih tinggi (Mardikanto, 2007:2).

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan nasional, Kementerian Pertanian (2013) telah menetapkan 4 (empat) sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan diversifikasi pangan, (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) Peningkatan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu menerapkan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan.

Sasaran utama pembangunan pertanian adalah pembangunan manusia karena tanpa adanya perubahan yang terjadi di dalam diri manusia yang dibangun, maka sulit untuk mencapai perbaikan-perbaikan kondisi masyarakat secara terus menerus sehingga hasil pembangunan fisik dan ekonomi menjadi kurang berarti jika tidak dibarengi dengan keberhasilan pembangunan manusia. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, sasaran yang ingin dicapai juga berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani sehingga mereka akan mampu untuk mandiri karena tanpa adanya penambahan pengetahuan dan keterampilan serta perbaikan sikap mereka, akan sulit untuk memperbaiki kehidupan mereka yang masih tradisional (Suhardiyono, 1992:4).

Penyuluhan pertanian adalah orang yang mengemban tugas memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara baru yang lebih sesuai dengan

perkembangan zaman, perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju. (Kartasapoetra, 1994:45). Kegiatan penyuluhan pertanian pada intinya adalah pembinaan terhadap masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani, harus ditata dan dikembangkan sedemikian rupa agar harapan mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Penyuluhan pertanian yang merupakan proses mendidik masyarakat, perlu upaya penumbuhan partisipasi melalui proses belajar mengajar masyarakat secara persuasif, edukatif dengan peran aparatur sebagai fasilitator dalam memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat secara optimal dengan jalan penyiapan komunikator yang andal, materi, metoda yang cocok, saluran efektif serta analisa kondisi sasaran yang tepat (Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006, menyatakan bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan/atau Penyuluh Pertanian Swasta. Penyuluh Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh pertanian swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2008 tentang pedoman pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, bahwa Penyuluh Pertanian Swasta sebagai indikasi bahwa keterbatasan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian memerlukan mitra kerja yang memadai. Kedudukan Penyuluh Pertanian Swasta adalah sebagai mitra Penyuluh Pertanian PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik sendiri-sendiri maupun kerjasama yang terintegrasi dalam program penyuluhan pertanian sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan penyuluhan diselenggarakan.

Selama ini sampai dengan tahun 2006, Indonesia hanya mengenal satu jenis penyuluh pertanian, yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang diangkat dan digaji oleh pemerintah, demikian pula dengan seluruh biaya operasionalnya yang juga ditanggung pemerintah. Namun, semenjak keluarnya Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, telah diakui tiga jenis penyuluh, yaitu penyuluh PNS, penyuluh pertanian swasta, dan penyuluh swadaya (petani). Khusus untuk tipe penyuluh yang baru ini, yakni penyuluh swadaya dan swasta, telah dikeluarkan pula Permentan No. 61 tahun 2008 Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta. Disebutkan dalam kebijakan ini bahwa penyuluh pertanian swasta dan swadaya membantu penyuluh pemerintah dalam format kemitraan. Namun demikian, meskipun telah berjalan hampir 10 tahun semenjak keluarnya UU ini, bagaimana dukungan dan kemitraan di lapangan antar ketiga jenis penyuluh ini belum berjalan dan masih membingungkan (Syahyuti, 2013:1).

Pada Rapat Koordinasi Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakornas P3K) di Jakarta bulan Januari 2014, disepakati bahwa pemerintah akan memberi peran yang lebih luas bagi para penyuluh pertanian swasta untuk berpartisipasi secara aktif. Pemerintah akan membuka ruang yang lebih luas kepada sektor swasta yang terlibat aktif melakukan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. SDM untuk penyuluh pertanian swasta dapat berasal dari dunia usaha, namun memiliki kompetensi di bidang penyuluhan (Harian Kabar Bisnis, 10 Januari 2014).

Dalam tulisan Syahyuti (2013), hasil penelitian (Setiawan *et al.*, 2009) berkenaan dengan ketiga jenis penyuluh menunjukkan bahwa peran penyuluh masih lemah, sementara integrasi dan koordinasi peran antar penyuluh baik secara vertikal maupun horizontal juga tidak berjalan efektif. Sementara, penelitian tahun 2013 di tiga propinsi (Indraningsih *et al.*, 2013) mendapatkan bahwa belum ada pemerintah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan yang telah melakukan kegiatan berkenaan dengan penyuluh pertanian swasta, bahkan sekedar melakukan pendataan. Tambahan lain, pada tanggal 18 April 2012 telah dilaksanakan kegiatan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta Provinsi D.I.Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Bidang Koordinasi Penyuluhan Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY. Kegiatan ini hanya dihadiri penyuluh swadaya tanpa ada penyuluh pertanian swasta seorang pun (Anonymous, 2012).

Menurut Syahyuti (2014) dalam tulisannya yang berjudul *Potensi Hebat Penyuluh Pertanian Swasta*, bahwa secara umum, dari berbagai literatur ada tiga jenis penyuluh pertanian swasta, yaitu: (1) Staf perusahaan swasta, yakni staf perusahaan-perusahaan yang menjual input, perusahaan pengolahan pertanian, dan pelaku pemasaran. Ini kita kenal dengan *supplier*, distributor, atau formulator. (2) Penyuluh dari kalangan *non profit sector* yakni dari perguruan tinggi, NGO dan lain-lain. Ini potensinya luar biasa, dan (3) Penyuluh yang berbentuk *pay for service*. Ini adalah penyuluh yang dibayar langsung oleh petani atau organisasi petani (bisa Gapoktan atau asosiasi komoditas).

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila berada dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan bila melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas (Oliver dalam Supranto, 2011: 233).

Efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian oleh Penyuluh pertanian swasta dapat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat petani dalam memperoleh pelayanan dari Penyuluh pertanian swasta tersebut. Apabila penyelenggaraan penyuluhan tersebut dilaksanakan secara benar, kontinyu, dan konsisten, maka tingkat kepuasan petani juga akan tinggi yang berdampak pada tingkat kualitas hidup petani (Listiawati, 2010:2)

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang terjadi di Sumatera Barat yaitu belum kuatnya sistem penyuluhan pertanian, dimana sistem ini dibangun oleh subsistem sumberdaya personil, subsistem kelembagaan, subsistem sarana, dan subsistem metode penyuluhan. Disadari bahwa pada saat ini sistem penyuluhan belum kuat, sehingga belum mampu secara optimal untuk melakukan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. Faktor penyebab belum kuatnya sistem penyuluhan adalah keterbatasan penyuluh baik dari segi jumlah maupun kompetensi,

kelembagaan penyuluhan yang belum mandiri dan inovatif, kurangnya sarana serta metode yang belum sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat, 2013). Belakangan ini terdapat kecenderungan ke arah swastanisasi jasa-jasa penyuluhan pemerintah. Penyuluhan dan informasi penyuluhan semakin serius diberikan oleh: perusahaan komersial yang menjual input dan membeli produk dari petani, bank, konsultan swasta yang memungut biaya yang dikeluarkan (Ban dan Hawkins, 1998:300).

Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah yang banyak membudidayakan tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran bahkan menjadi salah satu sentral produksi di Sumatera Barat. Kabupaten Solok memiliki produksi sayuran terbesar di Sumatera Barat yaitu Bawang Merah (1.235 Ton), Bawang Putih (347), Bawang Daun (710 Ton), Kentang (1299), Kubis (1.258 Ton), Sawi (124 Ton), Wortel (1.576 Ton), Cabe Rawit (467 Ton), Cabe (99 Ton), Tomat (1.567 Ton), Terung (121 Ton), Buncis (408 Ton), Ketimun (75 Ton) dan Total keseluruhan produksi adalah 9.286 Ton (Lampiran 1). Kecamatan Lembah Gumanti merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk kegiatan produksi pertanian terutama di bidang hortikultura. Selain itu pada Kecamatan Lembah Gumanti pertanian merupakan profesi dominan, itu terlihat pada jumlah KK Tani untuk keempat nagari yaitu 12.312 KK (Lampiran 2). Di daerah ini juga tersebar berbagai formulator (penyuluh pertanian swasta) dari bermacam-macam perusahaan input pertanian seperti benih, salah satu perusahaan benih yang ada di kecamatan ini adalah PT Tri Berkas Agro.

Tomat merupakan komoditi unggulan selain Bawang Merah di kecamatan Lembah Gumanti. Bahkan Kecamatan Lembah Gumanti memproduksi Tomat terbanyak di kabupaten Solok, ini terlihat pada data Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman tomat oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (Lampiran 3). Hal ini menjadi daya tarik bagi produsen input pertanian khususnya benih. Di daerah

PT Tri Berkas Agro merupakan salah satu perusahaan yang menjual produk-produk pertanian seperti benih hortikultura dan humagrow yaitu humus 85% yang merupakan humus kadar tinggi, siap pakai dalam bentuk granular crystal yang

dapat larut dalam air dan terbuat dari ekstrak batu-batuan alami yang mengandung unsur humus tinggi. Perusahaan ini memiliki staf lapangan yang ditempatkan didaerah-daerah yang potensial dalam pengembangan pertanian, untuk penempatan staf lapangan dilihat berdasarkan potensi daerah masing-masing. Pada perusahaan Tri Berkas Agro, staf lapangan yang ditempatkan didaerah-daerah memiliki jabatan tersendiri dalam perusahaan yaitu Field Representative atau lebih dikenal oleh petani dengan sebutan formulator sedangkan dalam ilmu penyuluhan kita kenal dengan sebutan Penyuluh pertanian swasta sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa penyuluh pertanian swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

Petani didaerah ini sangat mendukung adanya penyuluh pertanian swasta karena membantu dalam kegiatan pertanian. Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian swasta didaerah ini adalah dengan memberikan penyuluhan terkait dengan budidaya tanaman hortikultura (pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan dari hama dan penyakit sampai kepada pemanenan), pemberian informasi terbaru terkait dengan pertanian dan pemasaran produk. Metode pendekatan yang digunakan melalui percobaan dan edukasi kepada para petani. Metode percobaan digunakan untuk menguji dan membuktikan bahwa produk yang dijual memiliki kualitas yang bagus serta untuk menarik minat petani menggunakan produk perusahaan dan petani dapat melihat secara langsung dari awal sampai hasil akhir pelaksanaan percobaan. Sedangkan pendekatan edukasi kepada petani digunakan untuk menambah pengetahuan baru seputar pertanian untuk diterapkan oleh petani.

Perusahaan memiliki indikator keberhasilan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, penyuluh pertanian swasta/formulator haruslah mampu mengembangkan daerah yang dianggap potensial untuk dikembangkan dalam bidang pertanian dan penyuluh pertanian swasta dituntut untuk mengenal daerah kerjanya serta sejauh mana mampu mengenalkan produk kepada petani dengan menggunakan cara kerja penyuluhan. Untuk jangka panjang, penyuluh

pertanian swasta atau formulator dituntut untuk menjual produk dengan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan pertahunnya.

Keberadaan penyuluh pertanian swasta selama ini, sering dianggap sebagai sales atau orang-orang yang hanya menjual produk, namun demikian keberadaan penyuluh pertanian swasta selalu diminati petani. Kelebihan penyuluh pertanian swasta adalah ia penghasil teknologi, dan ia bertanggung jawab kepada keefektifan teknologi tersebut secara langsung. Jika penyuluh PNS ukuran penilaian pegawainya adalah loyalitas. Sedangkan organisasi swasta desentralistis, pegawainya ramping dan efisien, dan indikator kinerja pegawainya adalah pencapaian hasil (Syahyuti, 2013:10). Peran penyuluh pertanian swasta semakin penting dalam pembangunan pertanian karena mereka intensif dalam memberikan penyuluhan kepada petani, dan juga permasalahan penyuluhan pertanian swasta masih sangat awam di Indonesia, sehingga referensi berkenaan dengan penelitian dan kebijakan hampir tidak ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka timbul pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh pertanian Swasta (PT Tri Berkas Agro) dalam mengembangkan komoditi hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Bagaimana tingkat kepuasan petani terhadap peran Penyuluh Pertanian Swasta PT Tri Berkas Agro dalam mengembangkan komoditi hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul : **Analisis Kepuasan Petani terhadap Peran Penyuluh Pertanian Swasta (PT Tri Berkas Agro) dalam Mengembangkan Komoditi Hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.**

### C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh pertanian swasta (PT Tri Berkas Agro) dalam mengembangkan komoditi hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
2. Menganalisis tingkat kepuasan petani terhadap peran penyuluh pertanian swasta (PT Tri Berkas Agro) dalam mengembangkan komoditi hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti terkait dengan penyuluh pertanian swasta. .
2. Bagi penyuluh, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan dalam melaksanakan penyuluhan dan meningkatkan peranan dalam pembangunan sektor pertanian.
3. Bagi petani, diharapkan mendapat layanan yang optimal dari penyuluh sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

